

**PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Moh Machith Masrufi<sup>1</sup>, Harun Blongkod<sup>2</sup>, Amir Lukum<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [machith2002@gmail.com](mailto:machith2002@gmail.com)<sup>1</sup>, [blongkod@ung.ac.id](mailto:blongkod@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [amirlukum@ung.ac.id](mailto:amirlukum@ung.ac.id)<sup>3</sup>

***Abstract:** This study aims to determine the influence of the Regional Government Information System (SIPD) on regional financial management in the Regional Organization (OPD) of Bone Bolango Regency. This research uses a quantitative method. The results show that the use of SIPD and human resource competence have a positive and significant impact on regional financial management in OPD Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. Furthermore, both SIPD and SDM competence simultaneously show a positive and significant influence on regional financial management in OPD Bone Bolango Regency, Gorontalo Province.*

***Keywords:** SIPD, Human Resources, Regional Financial Management.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran krusial dalam memastikan penggunaan sumber daya manusia yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pengaruh penggunaan Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) terhadap pengelolaan keuangan daerah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selain itu, baik Penggunaan SIPD maupun Kompetensi SDM secara simultan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci:** SIPD, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem informasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam konteks memasuki era Revolusi Industri 5.0. Era ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang mendorong modernisasi sistem pemerintahan sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan global yang cepat. Teknologi otomatisasi telah mulai mendominasi berbagai sektor, yang tidak

hanya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia tetapi juga memberikan dorongan baru untuk efisiensi operasional. Dalam kerangka ini, diperlukan integrasi antara inovasi di bidang ekonomi kreatif dan pendekatan yang berorientasi pada manusia, karena dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif, Indonesia dapat menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mencapai tujuan pembangunan yang inklusif (Siagian 2023).

Dalam ranah pemerintahan, penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik mencakup pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Meskipun potensi teknologi informasi sangat besar, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah masih signifikan.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran krusial dalam memastikan penggunaan sumber daya manusia yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahunan. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan yang baik bisa dilihat sebagai langkah strategis yang sangat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, penting juga bagi pemerintah daerah untuk meping (mengidentifikasi dan memetakan) kebutuhan dan potensi yang ada, sehingga bisa lebih efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada serta mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak terjadi pemborosan. Anggaran daerah harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UU No. 12 Tahun 2019 juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan yang disiplin, hingga pelaporan yang akurat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil pembangunan.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah mengalami kendala yang signifikan baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Dari segi teknis, menu-menu yang seharusnya terdapat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam sistem SIPD belum lengkap, yang mengakibatkan kesulitan dalam penginputan dan pengolahan data. Hal ini berpotensi menghambat akurasi informasi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Di sisi lain, tantangan non-teknis yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan penyesuaian sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam sistem SIPD. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami cara kerja dan fungsi dari sistem ini, sehingga berdampak pada kesalahan dalam penginputan data dan proses pengambilan keputusan yang tidak optimal hal ini pun yang terjadi di Badan keuangan dan pendapatan Kabupaten Bone Bolango.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD dan SIMDA, penting untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas penggunaan SIPD dan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah (Cici Ariska, Rudi masniadi 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menggali

hubungan antara implementasi SIPD dan pengelolaan keuangan daerah, serta memahami bagaimana kompetensi pegawai dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi ini. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPD, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, terutama dalam konteks transisi dari SIMDA ke SIPD.

Penelitian oleh Tumija, Hendra, and Sinurat (2023) menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan dapat memungkinkan instansi untuk menyediakan layanan yang lebih berkualitas dan responsif. Namun, seringkali, proses pengelolaan keuangan daerah terhambat oleh kendala teknis dan non-teknis, seperti kesulitan dalam penginputan data, terutama pada Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), serta tantangan adaptasi pegawai terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru.

Berdasarkan fenomena yang ada, analisis lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan SIPD dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Judul penelitian “Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah” diharapkan dapat menggali hubungan antara implementasi SIPD dan pengelolaan keuangan daerah, serta memahami bagaimana kompetensi pegawai dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi ini.

## KAJIAN TEORITIS

### Teori Manajemen Publik

Manajemen publik adalah disiplin ilmu yang fokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sektor publik. Secara umum, manajemen publik bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah dalam rangka

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta, sektor publik harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dampak positif bagi kesejahteraan umum. Dengan demikian, manajemen publik menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program pemerintah (Adolph 2016).

Menurut Yudhiantara (2021) Manajemen publik adalah cabang atau satu aspek dari bidang studi yang lebih luas yakni ilmu administrasi publik. Sebagai bagian dari Administrasi Publik, Manajemen Publik adalah ilmu dan seni yang berintikan methodology terapan untuk merancang program program administrasi publik, restrukturisasi organisasi, kebijakan dan perencanaan manajerial, alokasi sumberdaya, system penganggaran (budgeting systems), pengelolaan financial, manajemen SDM, masalah audit serta evaluasi program. Secara lebih spesifik, sering pula dikatakan bahwa manajemen publik memandang administrasi publik sebagai profesi sedangkan administrasi publik memandang manajer publik sebagai praktisi.

Selain itu, teori manajemen publik juga menggaris bawahi pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, terutama melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah memiliki peluang untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan keterbukaan, dan memfasilitasi partisipasi publik. Salah satu teori yang banyak dibahas dalam manajemen publik adalah Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory), yang menyatakan bahwa keputusan pemerintah harus lebih terfokus pada preferensi masyarakat dan efisiensi dalam pelayanan (Yudhiantara 2021).

Teori Pilihan Publik atau Public Choice Theory muncul sebagai pendekatan yang menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kebutuhan dan preferensi masyarakat. Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa individu

bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks ini, pemerintah dipandang sebagai agen yang harus mempertimbangkan suara dan kepentingan masyarakat saat merumuskan kebijakan. Penerapan teori ini dalam manajemen publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap harapan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek, Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selama periode Januari sampai Maret 2025. Objek penelitian adalah pengaruh penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa besar pengaruh penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik pengelolaan keuangan daerah serta implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini ingin mengidentifikasi bagaimana kemampuan dan keterampilan SDM berkontribusi dalam penerapan SIPD, serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemilihan Kabupaten Bone Bolango didasarkan pada keberagaman karakteristik pengelolaan keuangan daerah yang mencakup variasi dalam tingkat perkembangan ekonomi, infrastruktur, akses teknologi, dan kapasitas SDM. Keberagaman ini diharapkan

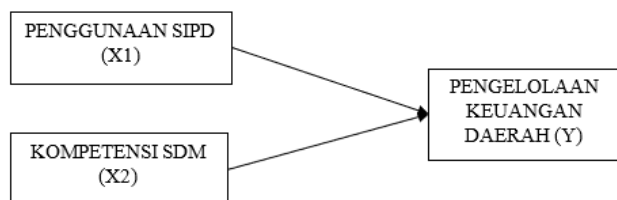
dapat memberikan variasi data yang kaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan SIPD dan kompetensi SDM dalam berbagai konteks.

### **Desain Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang diterapkan oleh peneliti untuk memilih model dan pendekatan dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, variabel dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas merupakan variabel yang terjadi atau ada sebelum variabel terikat, berfungsi untuk menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Di sisi lain, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) dan variabel dependen ( $Y$ ). Variabel independen yang pertama adalah penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ( $X_1$ ), sementara variabel independen kedua adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ( $X_2$ ). Variabel dependen yang diteliti adalah pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ). Kedua variabel independen ini berperan penting dalam menjelaskan variasi dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana kompetensi SDM diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD dalam konteks pengelolaan keuangan. Dengan menerapkan metode ini, penulis dapat merancang desain penelitian yang sederhana. Desain penelitian tersebut menggambarkan prosedur yang mungkin digunakan untuk menguji hipotesis, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai hubungan dan

pengaruh antara variabel independen, dan variabel dependen dalam penelitian ini. Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah.



**Gambar 3. 1 :** Desain Penelitian

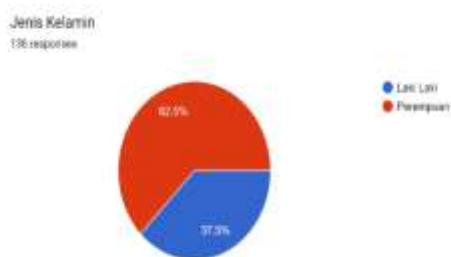
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ketika populasi sangat besar dan peneliti menghadapi keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat memilih sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 136). Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive.

**Tabel 3. 1** Jumlah Sampel

No.	Daftar Bidang OPD	Total Responden
qa1.	Perbendaharaan	44
2.	Sekretariat	25
3.	Akuntansi	15
4.	Administrasi	28
5.	Anggaran	24
<b>Total Responden</b>		<b>136</b>

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Profil Reposden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber : Lampiran 1 data diolah kembali  
**Gambar 4. 1** Diagram variasi responden berdasarkan jenis kelamin

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang terlibat mencapai 136 orang. Dari total tersebut, responden perempuan mendominasi dengan persentase 62,5%, atau sebanyak 85 orang. Sementara itu, responden laki-laki hanya mencapai 32,5%, atau sebanyak 44 orang. Ini menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian ini, perempuan memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

**Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas merujuk pada situasi di mana terdapat hubungan korelasi yang tinggi di antara satu atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi. Menurut Ghozali (2017), multikolinearitas dapat diidentifikasi apabila nilai koefisien korelasi antara variabel independen melebihi angka 0,9.

**Tabel 4. 1** Hasil Uji Multikolinearitas Correlations: (Group Number 1 – Default Model)

Variabel	Estimate
X1 <--> X2	0,598

Sumber : AMOS 24

Hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel independen adalah 0,598. Nilai ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model *Structural Equation Modeling* (SEM) yang sedang dianalisis.

**Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai keandalan instrumen penelitian dalam mengukur indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti. Sebuah kuesioner dapat dianggap reliabel jika tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam

kuesioner tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pengujian reliabilitas dilaksanakan dengan menganalisis nilai *Cronbach's Alpha*, yang merupakan ukuran umum untuk mengevaluasi ketepatan dan konsistensi internal dari instrumen pengukuran. Hasil yang diperoleh dari pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 2** Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	Alpha Toleransi	Status Item
1.	Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (X1)	0,946	0,6	Reliabel
2.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X2)	0,939	0,6	Reliabel
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,936	0,6	Reliabel

Sumber: *Reliability Construct Table*

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas yang ditetapkan, yaitu dengan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh melebihi 0,6 ( $\alpha \geq 0,6$ ), sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Sunyoto (2009).

**Hasil Uji Normalitas Variabel Penggunaan Sistem Informasi Daerah (X1)**

**Tabel 4. 3** Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	c.f.	kurtosis	c.f.
X1.1	2	5	-0,355	-1,688	-0,060	-0,144
X1.2	2	5	-0,366	-1,744	-0,542	-1,289
X1.3	2	5	-0,655	-3,117	0,465	1,107
X1.4	2	5	-0,451	-2,147	-0,080	-0,191
X1.5	1	5	-0,575	-2,736	0,914	2,176
X1.6	1	5	-0,793	-3,773	1,105	2,630
X1.7	2	5	-0,534	-2,542	0,022	0,051
Multivariate					14,272	7,414

Pada Tabel 4.8, hasil nilai multivariate dari *Assessment of Normality* menunjukkan angka 7,414, yang melebihi ambang batas 2,58. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak memenuhi

asumsi normalitas, Hal ini penting untuk validitas analisis multivariat. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan metode *Bollen-Stine bootstrap*. Penggunaan metode ini sangat berguna dalam konteks analisis SEM, di mana akurasi dan keandalan hasil sangat krusial.

**Bollen-Stine Bootstrap (Default model)**

The model fit better in 153 bootstrap samples.
It fit about equally well in 0 bootstrap samples.
It fit worse or failed to fit in 47 bootstrap samples.
Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap p = .239

Sumber : AMOS 24

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian untuk variabel Penggunaan Sistem Informasi Daerah (X1) telah berdistribusi normal. Dengan menggunakan metode *Bollen-Stine bootstrap*, seluruh item pertanyaan atau pernyataan berada dalam interval  $0,239 < z < 2,58$ . Ini mengindikasikan bahwa data yang akan dianalisis telah memenuhi asumsi normalitas, baik secara univariat maupun multivariat. Dengan demikian, data tersebut layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut, seperti analisis SEM, untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

**Hasil Uji Normalitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)**

**Tabel 4. 4** Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	c.f.	kurtosis	c.f.
X2.1	3,000	5,000	-0,271	-1,289	-0,647	-1,540
X2.2	2,000	5,000	-0,429	-2,043	-0,027	-0,065
X2.3	2,000	5,000	-0,641	-3,053	0,080	0,189
X2.4	2,000	5,000	-0,562	-2,674	-0,058	-0,139
X2.5	2,000	5,000	-0,617	-2,94	0,155	0,370
X2.6	2,000	5,000	-0,646	-3,074	0,065	0,155
X2.7	1,000	5,000	-1,223	-5,823	3,164	7,533
X2.8	1,000	5,000	-1,131	-5,382	2,308	5,493
X2.9	1,000	5,000	-0,755	-3,596	0,872	2,075
X2.10	1,000	5,000	-0,939	-4,469	1,683	4,007
X2.11	2,000	5,000	-0,595	-2,83	0,804	1,913
Multivariate					47,318	16,315

Pada Tabel 4.9, hasil nilai multivariate dari *Assessment of Normality* menunjukkan angka

16,315, yang melebihi ambang batas 2,58. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, Hal ini penting untuk validitas analisis multivariat. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan metode *Bollen-Stine bootstrap*. Penggunaan metode ini sangat berguna dalam konteks analisis SEM, di mana akurasi dan keandalan hasil sangat krusial.

**Bollen-Stine Bootstrap (Default model)**

The model fit better in 160 bootstrap samples.
It fit about equally well in 0 bootstrap samples.
It fit worse or failed to fit in 40 bootstrap samples.
Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap $p = .204$

Sumber : AMOS 24

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) telah berdistribusi normal. Dengan menerapkan metode Bollen-Stine bootstrap, seluruh item pertanyaan atau pernyataan berada dalam interval  $0,204 < z < 2,58$ . Hal ini mengindikasikan bahwa data yang akan dianalisis memenuhi asumsi normalitas, baik dalam analisis univariat maupun multivariat. Dengan demikian, data tersebut siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut, termasuk dalam konteks analisis SEM, untuk mengevaluasi hubungan antar variabel yang diteliti.

**Hasil Uji Normalitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (Y)**

**Tabel 4. 5 Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
Y1	1	5	-1,048	-4,988	2,617	6,230
Y2	1	5	-0,737	-3,507	0,810	1,929
Y3	1	5	-0,767	-3,652	1,086	2,585
Y4	1	5	-0,919	-4,376	1,58	3,762
Y5	1	5	-1,001	-4,765	1,182	2,815
Y6	2	5	-0,637	-3,034	-0,231	-0,551
Y7	1	5	-1,020	-4,856	2,184	5,200
Y8	1	5	-0,678	-3,228	0,653	1,554
Y9	1	5	-1,193	-5,680	2,501	5,953
Y10	1	5	-0,973	-4,632	1,836	4,369
Y11	1	5	-1,02	-4,854	2,130	5,07
Y12	3	5	-0,255	-1,214	-0,625	-1,488
Multivariate					69,352	22,061

Pada Tabel 4.10, hasil nilai multivariate dari *Assessment of Normality* menunjukkan angka 22,061, yang melebihi ambang batas 2,58. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, Hal ini penting untuk validitas analisis multivariat. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan metode *Bollen-Stine bootstrap*. Penggunaan metode ini sangat berguna dalam konteks analisis SEM, di mana akurasi dan keandalan hasil sangat krusial.

**1 Uji Parsial**

Selanjutnya, tahap pengujian hipotesis penelitian akan dilakukan, yang difokuskan pada satu hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Proses pengujian hipotesis ini menggunakan nilai t-value dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan pada 0,05. Dalam analisis menggunakan perangkat lunak AMOS 24, nilai t-value diwakili oleh *Critical Ratio (C.R.)* yang terdapat pada bagian *Regression Weights: (Group number 1 – Default model)* dari model yang sesuai (Full Model\_4). Apabila nilai *Critical Ratio (C.R.)* mencapai atau lebih besar dari 1,660 atau nilai *probabilitas (P)* lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis nol (H0) akan ditolak, dan hipotesis penelitian dianggap diterima. Hasil dari nilai *Regression Weights: (Group number 1 – Default model)* yang dihasilkan oleh AMOS 24 untuk model penuh (Full Model\_3) dapat dilihat pada Tabel 4.25 :

**Tabel 4. 6 Regression Weights : (Group Number 1 – Default Model)**

Variabel	Estimate	SE	C.R.	P	Kesimpulan
Y <-- X1	0,234	0,079	2,943	0,003	Signifikan
Y <-- X2	0,352	0,112	3,160	0,002	Signifikan

Tabel 4.25 di atas berfungsi sebagai referensi utama dalam pelaksanaan uji hipotesis untuk penelitian ini. Kriteria yang diterapkan dalam pengujian ini adalah menerima hipotesis alternatif (Ha) jika nilai t-value atau *Critical*

Ratio (C.R.) mencapai atau melebihi 1,660, atau jika nilai *probabilitas* (P) lebih kecil atau sama dengan 0,05.

**2 Uji Simultan**

**Tabel 4. 7** Squared Multiple Correlations:  
(Group number 1 - Default model)

Variabel	Estimate
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,622

Besar kontribusi simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan dalam tabel yang telah disajikan sebelumnya. Nilai *R-square* yang diperoleh menunjukkan angka 0,622, yang berarti bahwa 62,2% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh kombinasi dari variabel independen yang dianalisis. Selain itu, standar yang direkomendasikan mengindikasikan bahwa nilai *R-square* dianggap signifikan jika mencapai *Squared Multiple Correlation* (SMC)  $\geq 0,50$ . Dengan berlandaskan pada Tabel 4.26, analisis ini memungkinkan penyusunan diagram koefisien t-hitung dari hasil analisis full model<sub>2</sub>, yang akan diilustrasikan dalam Gambar 4.14 berikut.



**Gambar 4. 2** Koefisien thitung full model<sub>2</sub>

Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menghasilkan temuan yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Temuan tersebut memberikan

pemahaman yang jelas mengenai hubungan antar variabel, serta mendukung atau menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa temuan-temuan penelitian tersebut secara jelas menunjukkan bahwa:

1. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
3. Selain itu, baik Penggunaan SIPD maupun Kompetensi SDM secara simultan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di OPD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang membuktikan bahwa kombinasi kedua variabel ini memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adolph, Ralph. 2016. "Teori Manajemen Publik." : 1–23.

Ardiansyah, Muhammad, Universitas Muhammadiyah, and Sidenreng Rappang. 2021. "E-Government; Pemerintahan Daerah."

Cici Ariska, Rudi masniadi, Rosyidah Rachman. 2019. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah ( Simda ) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." (September 2015).



- Dewi, Malasari, Nia Sumiati, and Warman Suryaman. 2023. "Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10(2): 621–24.
- Fransiska, Yulia. 2021. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Namo Gajah." *Jurnal Neraca* 1(1).
- Ghozali, I. 2016. *Structural Equation Modelling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2021. "Manajemen Keuangan Daerah."
- Hariyono, A. 2016. *Analisis Structural Equation Modeling (SEM) Dan Aplikasinya Dalam Penelitian*.
- Hunairah, Andi, and Rezkiaty Syamsu. 2024. "SEIKO: Journal of Management & Business Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD ) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba." 7(2): 464–78.
- Immamah, Kurnia Dwi. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Keuangan , Pengalaman Keuangan , Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Keuangan ( Studi Pada Pedagang Pasar Sekaran )." 2(1): 43–52.
- Jenderal, Direktorat, Bina Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Karianga, Hendra. 2017. *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. ed. Irfan Fahmi.
- Lazuardi, Andoni, and Hartini Prasetyaning Pawestri. 2024. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah ( SIKD ) Di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) Pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan." 13(3): 582–95.
- Lestari, Puji Ayu. 2023. 44 *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Persepsi Penerimaan Pengguna Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Kabupaten Lampung Utara*.
- Majid, Jamaluddin. 2019. "Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik." *Umsida Press* (August): 1–87.
- Mardismo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019a. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah." *Permendagri Republik Nomor 70 Nomor 65(879)*: 2004–6.
- . 2019b. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah." *Permendagri Republik Nomor 12*.
- Musannip, Zulkifli et al. 2021. *Structural Equation Modeling*.
- Muttaqin, Izzul, Ulfa Adiranti, and Rahayu Dewi Zakiyah. 2023. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 9(1): 2310–18.
- Nanda, Dias, Ekaputra. 2021. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKP Di Kabupaten Nganjuk." *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat* 21(April): 6.

- Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 109.
- Nirmala, Dewi, Iffansyah, and Muhammad Zakir. 2023. "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) Pada Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura Dan Perkebunan ( DTPHP ) Kabupaten Donggala Implementation of the Regional Government Information System ( SIPD ) at the Department of Food Crops , Horticult." *Kolaboratif Sains* 6(7): 887–94.
- Olisah, Hermawan Denny, and Purnamasari Irma. 2019. "Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor." 5: 149–56.
- Putri, Rahmadani, and Khairul. 2024. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Badan Keuangan Kota Bukittinggi." 4(5).
- R Pamungkas, Agung, and Edi Nugroho. 2020. "Evaluasi Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan E-Government: Studi Literatur." *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)* 3(3): 143–52.
- Sam, Iskandar, Misni Erwati, and Muhammad Febriansyah. 2024. "Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3(2): 90–104.
- Siagian, Hendra Fridolin Ananda Sudater. 2023. "Mengenal Revolusi Industri 5.0." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html>.
- Sugiyono. 2015. *Statistik Untuk Penelitian*.
- . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sugiyono, D. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sukaria, T. 2020. "Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Akuntabilitas Sektor Publik."
- Sukirno, Sadono. 2010. "Makroekonomi Teori Pengantar." : 87–339.
- Susano, Adhi, and Meida Rachmawati. 2024. "Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES )." 12(1): 50–58.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. 2019. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2(2): 218–34.
- Tumija, Asep Hendra, and Marja Sinurat. 2023. "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Media Birokrasi* 5(1): 79–91.
- Tumija, Tumija, and Prayoga Arif Erlambang. 2023. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Media Birokrasi*: 155–69.
- Yudhiantara, I Made. 2021. *Teori Manajemen Publik*.